

**MASYARAKAT MULTILINGUAL DAN KEBIJAKAN BAHASA
DI INDONESIA**

Multilingual Society and Language Policy in Indonesia

Prof. Dr. Mikihiro Moriyama
Fakultas Global Liberal Studies
Nanzan University
Pos-el: moriyama@nanzan-u.ac.jp

Abstrak

Dapat dikatakan bahwa Indonesia berhasil untuk mengukuhkan bahasa nasional setelah kemerdekaan dengan suatu kebijakan bahasa. Hal ini bukan hal yang mudah dan wajar tanpa usaha dan perjuangan dengan pemikiran tertentu apabila kita menimbang Indonesia pernah berada di bawah penjajahan lebih dari seratus tahun. Bahasa nasional itu dipilih dan diperjuangkan oleh bangsa baru sampai dijadikan pijakan yang kuat untuk negara merdeka. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi, bahasa administrasi, dan bahasa komunikasi di masyarakat yang majemuk dengan suku bangsa dan etnis. Dapat dikatakan kebijakan bahasa di Indonesia bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat monoglossia. Satu bahasa yang dipilih dan dikembangkan demi keberhasilan solidaritas masyarakat dari segi politik. Dari segi ekonomi bahasa sangat efisien dan efektif apabila negara mempunyai satu bahasa nasional dan administrasi. Baik pemerintahan Orde Lama maupun Orde Baru sama-sama menerapkan kebijakan berbahasa satu tanpa ragu, yaitu Bahasa Indonesia adalah satu-satunya bahasa untuk digunakan di wilayah Republik Indonesia. Makalah ini pertama-tama mencoba menelusuri keadaan pemakaian bahasa di masyarakat dari zaman Hindia Belanda sampai dengan abad ke-21. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat poliglossia, juga masyarakat yang terdiri atas orang-orang multilingual pada setiap zaman, baik zaman Hindia Belanda maupun masa setelah kemerdekaan. Dalam pembahasan ini daerah Jawa Barat yang dihuni oleh orang Sunda diambil sebagai contoh supaya tergambar situasi kebahasaan dari zaman ke zaman. Dengan singkat makalah ini akan membahas bagaimana Indonesia berhasil menciptakan masyarakat multilingual, bukan masyarakat monolingual, tanpa kekacauan. Berdasarkan sejarah kebahasaan ini akan dibahas wujud proporsi bahasa yang lebih baik antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing untuk abad ke-21.

Kata-kata kunci: kebijakan bahasa, masyarakat multilingual, bahasa daerah, zaman Hindia Belanda

Abstract

Indonesia has achieved a great deal in promoting and encouraging the spread of its national language since independence. The national language has played a significant role in uniting a diverse number of ethnic groups, each with their own language and culture. In the history of this process governments, both in the Dutch colonial period

and after independence, created and implemented a language policy with different purposes. Malay in colonial times and Bahasa Indonesia or Indonesian in the independent nation was selected respectively as the communication language and official language of the nation. The language chosen was neither the colonials' language nor the language of majority in the nation. The other ethnic languages of the archipelago were placed in a supplemental position. As a result, Indonesia has managed to promote the use of a single national language in the years since independence without subjecting the nation to linguistic irresolution and confusion. Interestingly, however, Indonesia has not become a monolingual society: what has emerged, instead, is a nation of multilingual peoples. This paper will briefly consider how multilingual societies have been formed in Indonesia over the course of twentieth century, and will then turn to explore how in particular, language policy has affected the language use of Sundanese society in West Java as an example. It will further be proposed that Indonesia has always been home to a particularly rich and diverse blend of multilingual peoples and cultures—an element which looks very much set to continue into this 21st century. Finally, this paper will attempt to outline a possible configuration of languages and societies in the Indonesia of the future.

Keywords: *language policy, multilingual, regional language, Dutch colonial period*

PENDAHULUAN¹

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang cukup unik dari segi bahasa.² Bagaimana keadaan bahasa yang unik itu terbentuk dan berkembang dalam sejarah? Dapat dikatakan bahwa Indonesia berhasil mengukuhkan bahasa nasional setelah kemerdekaan dengan suatu kebijakan bahasa. Hal ini bukan hal yang mudah dan wajar. Harus ada usaha dan perjuangan dengan pemikiran tertentu apalagi kita menimbang Indonesia pernah berada di bawah penjajahan lebih dari seratus tahun. Hal ini lebih terasa kalau dibandingkan dengan negara-negara yang pernah dijajah di Afrika, Amerika Latin, dan tempat lain di dunia. Bahasa nasional itu dipilih dan diperjuangkan oleh bangsa baru sampai dijadikan pijakan yang kuat untuk negara merdeka.

Sekali lagi Indonesia berhasil menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945, Pasal 36. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi, bahasa administrasi, dan bahasa komunikasi di masyarakat yang majemuk dengan suku bangsa dan etnis. Dapat dikatakan bahwa kebijakan bahasa di Indonesia bertujuan untuk menciptakan

¹ Makalah ini ditulis untuk Kongres Bahasa Indonesia XI yang akan dilaksanakan pada tanggal 28–30 Oktober 2018 di Jakarta, Indonesia. Penelitian ini sebagian dibantu dana dari Nanzan University Pache Research Subsidy I-A-2 for 2019. Pembahasan makalah ini pembahasan lanjutan dari makalah sebelumnya (Moriyama 2015a). Oleh karena itu, sebagian pembahasan bertumpang tindih dengan makalah tersebut.

² Saya ucapkan banyak terima kasih atas komentar terhadap makalah ini dan koreksi bahasa Indonesia kepada Dr. Hawe Setiawan, Universitas Pasundan di Bandung.

masyarakat monoglossia. Satu bahasa yang dipilih dan dikembangkan demi keberhasilan solidaritas masyarakat dari segi politik. Dari segi ekonomi bahasa sangat efisien dan efektif apabila negara mempunyai satu bahasa nasional dan administrasi. Baik pemerintahan Orde Lama maupun Orde Baru sama-sama menerapkan kebijakan berbahasa satu tanpa ragu, yaitu bahasa Indonesialah yang satu-satunya bahasa untuk digunakan di wilayah Republik Indonesia.

Meskipun demikian, apakah bahasa-bahasa selain bahasa Indonesia sudah hilang dan tidak dipakai sama sekali di tengah masyarakat? Tentu, tidak begitu kenyataannya. Wilayah Nusantara mempunyai banyak bahasa sejak lama dan masih dimanfaatkan, dan berbagai bahasa asing juga dipakai sejak lama. Makalah ini pertama-tama mencoba menelusuri keadaan pemakaian bahasa di tengah masyarakat dari zaman Hindia Belanda sampai dengan abad ke-21 untuk mencari jawaban atas pertanyaan sebagai berikut: bagaimanakah kebijakan bahasa pada zaman Hindia Belanda? Bagaimana orang memakai bahasa dalam kehidupan sehari-hari pada zaman Hindia Belanda, setelah kemerdekaan, dan zaman globalisasi ini? Apakah semua orang Indonesia adalah monolingual dari zaman ke zaman? Dalam pembahasan ini daerah Jawa Barat yang dihuni oleh orang Sunda diambil sebagai contoh supaya tergambar situasi kebahasaan dari zaman ke zaman. Dengan singkat makalah ini akan membahas bagaimana Indonesia berhasil menciptakan masyarakat multilingual, bukan masyarakat monolingual, tanpa menimbulkan kekacauan.

Makalah ini akan menelusuri sejarah singkat keadaan kebahasaan dalam masyarakat Indonesia untuk memikirkan subtopik “Proporsi Peran Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Bahasa Asing”, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat poliglossia, juga masyarakat yang terdiri atas orang multilingual pada setiap zaman, baik zaman Hindia Belanda maupun masa setelah kemerdekaan. Berdasarkan sejarah kebahasaan ini akan dibahas wujud proporsi bahasa yang lebih baik antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing untuk abad ke-21 ini.

1. Masyarakat Poliglossia pada Zaman Hindia Belanda

Di wilayah Nusantara yang sangat luas terdapat banyak bahasa di tengah masyarakat. Pada zaman Hindia Belanda penjajah menyadari hal itu dan mencoba menerapkan berbagai kebijakan mengenai bahasa. Tujuan utama bagi pemerintah kolonial adalah manajemen yang efisien supaya mendapat keuntungan yang lebih besar demi

kemakmuran *vaderland*, yaitu negeri Belanda. Untuk tujuan ini dirasakan perlunya ada pendidikan untuk membina orang pribumi sebagai *ambtenaar* atau pegawai negeri, dan sistem pendidikan Barat diperkenalkan kepada masyarakat tradisional pada pertengahan abad ke-19. Bahasa yang dipakai untuk sekolah Belanda bukanlah bahasa penjajah, bahasa Belanda, melainkan bahasa-bahasa lokal yaitu bahasa Jawa, Sunda, Melayu, dan lain-lain pada sekolah dasar, khususnya untuk mata pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Kebijakan ini berlainan dengan kebijakan yang diterapkan di tanah-tanah jajahan di Afrika atau Amerika Latin. Pemerintah kolonial Belanda secara konsisten memakai bahasa lokal untuk pendidikan pribumi.

Pada jenjang pendidikan yang lebih atas, dan untuk mata pelajaran yang lain seperti ilmu bumi dan ilmu alam pada sekolah dasar, diajarkan dengan bahasa Melayu karena disadari bahwa bahasa Melayu sudah lama digunakan sebagai bahasa komunikasi di antara orang-orang pribumi di wilayah Hindia Belanda, juga digunakan oleh kalangan lain seperti orang Indo dan peranakan, orang Arab, orang China, dan etnis lain. Bahasa Melayu juga berperan sebagai bahasa komunikasi antarbangsa. Pemerintah Hindia Belanda membuat bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi dan bahasa administrasi kedua setelah bahasa Belanda. Mereka juga mengupayakan standarisasi bahasa Melayu supaya bahasa itu dijadikan bahasa komunikasi dan bahasa pendidikan. Pada tahun 1872 bahasa Melayu yang dipakai di Melaka dan Riau diangkat sebagai bahasa Melayu standar, dan pada tahun 1901 ejaan bahasa Melayu pun distandarisasi dengan terbitnya buku *Kitab logat Melajoe* oleh Ch. A. van Ophuijsen.³

Bisa dikatakan ada semacam piramida bahasa, yaitu di tingkat paling atas ada bahasa Belanda, lapisan kedua adalah bahasa Melayu, dan lapisan yang paling bawah adalah bahasa-bahasa suku bangsa. Piramida ini sejajar dengan hierarki sosial pada masa itu. Kaum penjajah memakai bahasa Belanda, kaum elite pribumi berkomunikasi dengan penjajah dan sesama elite pribumi dalam bahasa Belanda, sedangkan dengan pribumi bawahannya dalam bahasa Melayu, *ambtenaar* rendah atau pegawai pemerintah kelas bawah dan rakyat memakai bahasa suku bangsa seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, dan bahasa Bali. Sungguh banyak bahasa pada masyarakat kolonial.

³ Pemerintah Hindia Belanda menetapkan bahasa standar untuk bahasa Jawa, bahasa Sunda, selain bahasa Melayu pada tahun yang sama. Bahasa Jawa yang dipakai di Surakarta dan bahasa Sunda di Bandung masing-masing ditetapkan sebagai bahasa standar (Moriyama, 2005: 23).

Cukup menarik kalau kita melihat bagaimana seorang bangsawan belajar dan menguasai bahasa untuk memahami keadaan poliglossia di tengah masyarakat pada masa Hindia Belanda. Raden Ahmad Djajadiningrat lahir di sebuah desa dekat Pandeglang sebagai anak *regent* Lebak di Residensi Banten pada tahun 1877 (Djajadiningrat, 1936). Keluarga Djajadiningrat adalah keluarga terpandang, dan dia sendiri menjadi gubernur Batavia dan anggota *Volksraad* atau Dewan Perwakilan Rakyat. Bahasa ibunya adalah bahasa Sunda di tengah masyarakat desa kelahirannya, juga bahasa Jawa dari ibunya yang berasal dari daerah utara Residensi Banten. Mungkin juga dia diajari aksara Jawa oleh ibunya sebagai salah satu pengetahuan budaya *ménak* pada masa itu. Memang, buku-buku berbahasa Sunda juga sempat dicetak dengan huruf Jawa oleh pemerintah kolonial (Moriyama, 2005: 90—92). Kaum elite di Pulau Jawa harus bisa membaca dan menulis dalam bahasa Jawa sampai dengan awal abad ke-20.

Bahasa pertama yang dipelajari oleh Ahmad kecil, sebagaimana lazimnya anak Muslim, adalah bahasa Arab. Dia pergi ke pesantren untuk mengaji dan belajar huruf Arab dan pelafalan bahasa Arab. Ayah Ahmad menyuruhnya belajar aksara Latin⁴ kepada pegawai bawahannya sebelum masuk sekolah Belanda supaya Ahmad tidak ketinggalan pelajarannya nanti. Ahmad mengenang, “Dalam beberapa minggu saja saya bisa membaca dan bisa menulis baik dengan potlot [dalam huruf Latin]” (*Na eenige weken kon ik vrij behoortlijk lezen en vrij netjes met potlot schrijven*) (Djajadiningrat, 1936: 24). Buku-buku yang dicetak pada masa itu semakin lama semakin banyak dalam huruf Latin. Kebanyakan buku sekolah pada abad ke-19 dicetak dan diterbitkan oleh *Landsdrukkerij* atau Percetakan Pemerintah (Moriyama, 2005: 79—87). Setelah datang waktunya, Ahmad masuk sekolah sistem Belanda yang didirikan oleh pamannya, dan mulai belajar bahasa Melayu serta bahasa Belanda. Semakin tinggi kelas dan pelajarannya di sekolah itu, proporsi bahasa Belanda semakin banyak. Ketika dia masuk sekolah Belanda (H.B.S. atau *Hogereburgerschool*) untuk 5 tahun, bahasa pengantarnya menjadi bahasa Belanda dan dia belajar bersama-sama dengan remaja Belanda. Dengan demikian, setidaknya, Ahmad bisa membaca 3 aksara, yaitu Arab, Jawa, dan Latin serta menguasai 4 bahasa, yaitu Sunda, Jawa, Melayu, dan Belanda.⁵

⁴ Aksara Latin **pada mulanya** disebut aksara Belanda.

⁵ Sangat mungkin Ahmad belajar bahasa Latin dan bahasa Inggris di H.B.S., **sedangkan** bahasa Arabnya mungkin dikuasai sebagai bahasa Agama, yaitu **untuk** memahami ayat-ayat **Qur'an**, tapi tidak bercakap dalam bahasa Arab.

Contoh di atas memang hanya menyangkut seorang elite pada zaman kolonial saja, tetapi mencerminkan betapa banyaknya bahasa di dalam kehidupan masyarakat. Orangny benar-benar multilingual dan masyarakatnya poliglossia. Paling tidak bahasa pemerintahan adalah bahasa Belanda dan bahasa Melayu di kalangan kaum atas ditambah bahasa daerah di kalangan kaum bawah. Dengan kata lain, pada masa Hindia Belanda situasi kebahasaan bersifat multilingual secara vertikal dan poliglossia secara horisontal. Namun, bahasa Melayulah yang menjadi lebih penting dalam masyarakat baik secara vertikal maupun secara horisontal. Ahmad Djajadiningrat menyadari hal itu, dan pernah mengajukan usul bersama rekan Belandanya supaya bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa resmi bersama bahasa Belanda di *Volksraad*.⁶ Usulnya di-setujui oleh sidang dengan pemungutan suara setelah perdebatan sengit, dan kejadian ini sangat berarti dalam pergerakan nasionalisme pada masa setelahnya.

Akan tetapi, masyarakat awam pada umumnya monolingual⁷. Mereka berbahasa daerah dan tidak mampu memakai bahasa Melayu yang semakin menjadi penting dalam masyarakat dengan nama baru Bahasa Indonesia (Moriyama, 2005: 24—30). Sekolah-sekolah mengajarkan bahasa Melayu dan memakai bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar untuk mata pelajaran. Namun, pemerintah kolonial tetap berupaya mempertahankan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya yang ada kaitannya dengan identitas setiap etnis. Bahasa Belanda tidak dijadikan bahasa komunikasi karena mereka menganggap bahasa Belanda terlalu sulit untuk rakyat jajahan dan makan biaya banyak. Kebijakan bahasa ini diterapkan dan dikembangkan melalui pendirian *Commissie voor de Inlandsche School- en Volkslectuur* atau Komisi untuk Buku-buku Sekolah Bumiputra dan Buku-buku Bacaan Rakyat pada 1908 yang kemudian dijadikan Balai Poestaka pada tahun 1917.

Dapat dikatakan bahwa kebijakan bahasa ini membutuhkan anggaran yang cukup besar bagi pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Sekali lagi kebijakan ini berbeda dengan negara jajahan yang lain. Maier menilai kebijakan bahasa yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda itu tidak berhasil karena tidak konsisten dengan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi di seluruh wilayah jajahannya

⁶ Ahmad Djajadiningrat mengajukan usul itu dalam pertemuan *Volksraad* pada tanggal 28 Mei 1918 (Nagatsumi, 1980: 206—209). Hari itu adalah hari ke-10 setelah *Volksraad* dibuka secara resmi.

⁷ Orang awam biasanya belajar ngaji sejak kecil sebagai pendidikan agama. Oleh karena itu, mereka membiasakan pelafalan bahasa Arab, dan ada juga yang menguasai bahasa Arab di antaranya sejak lama sampai sekarang.

(Maier, 1993: 56—57). Dengan kata lain, kebijakannya setengah-setengah, yakni tidak menetapkan satu bahasa untuk koloninya. Bersama bahasa Melayu terdapat bahasa Belanda dan bahasa suku bangsa di setiap daerah. Timbullah masyarakat poliglossia.

2. Masyarakat Multilingual Setelah Kemerdekaan

Rupanya, pada zaman setelah kemerdekaan, masyarakat poliglossia dan multilingual tersebut dibawa oleh kebijakan bahasa ke arah lain. “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia” ditetapkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Arah yang dituju adalah masyarakat monoglossia dan monolingual, yaitu bahasa Indonesia yang diutamakan demi persatuan bangsa dan pembangunan negara. Bahasa-bahasa daerah tidak begitu dihormati di bawah kebijakan monolingual, walaupun ditetapkan dalam UUD 1945 bahwa bahasa daerah harus dipelihara dan dihormati. Bahasa asing, terutama bahasa Belanda, lambat laun disingkirkan dari segala kegiatan masyarakat. Namun, tidaklah mudah memupus pemakaian bahasa Belanda yang sudah lama dan secara mendalam merasuk ke dalam kehidupan banyak orang, khususnya kalangan terdidik. Misalnya, pada zaman Orde Lama para pemimpin dan tokoh masyarakat, termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta, adalah orang-orang yang dididik dalam sistem pendidikan Belanda dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Akan tetapi, kebijakan bahasa yang menuju masyarakat monolingual dipacu dengan berbagai kejadian pada zaman Orde Baru. Yang pertama adalah kejadian Gerakan 30 September 1965. Presiden Soeharto melarang pemakaian bahasa Tionghoa di ruang publik sejak tahun 1966. Keturunan Tionghoa dan peranakan yang pernah mampu berbahasa Tionghoa semakin lama semakin sedikit oleh karena pelarangan itu.

Pemakaian bahasa Belanda di tengah masyarakat pun semakin lama semakin surut. Hubungan Indonesia dengan Belanda tidak baik lagi setelah Presiden Soeharto menolak bantuan lewat kerangka *Inter-Governmental Group on Indonesia* atau IGGI pada bulan Maret tahun 1992. Sejak kejadian ini kerja sama di antara kedua negara, misalnya di bidang pendidikan, menjadi sangat sedikit dan terbatas. Pengaruh bahasa dan budaya Belanda semakin tidak terasa bersamaan dengan hilangnya generasi tua yang pernah mengenyam pendidikan zaman kolonial.

Pengajaran dan pemakaian bahasa Arab juga tidak terlalu berkembang dalam pemerintahan Orde Baru. Semua sektor yang berpotensi membahayakan stabilitas

politik dan pembangunan nasional, termasuk kelompok agama Islam, pun ditekan oleh pemerintah. Pemakaian bahasa Arab dan kegiatan agama Islam berkurang dan tidak kelihatan di ruang publik, terutama di perkotaan, meskipun tradisi pengajaran Islam di masyarakat, khususnya di pedesaan, tetap berjalan tak berubah di tengah tekanan terhadap agama yang terasa di mana-mana.

Aspirasi daerah selalu ditekan dalam pemerintahan Orde Baru. Pemerintah pusat mencoba menguasai seluruh wilayah negara Republik. Konvergensi kekuatan di daerah dianggap bibit bahaya dan ketidakstabilan negara persatuan, serta dianggap akan mengganggu perkembangan ekonomi dan pembangunan negara. Oleh karena itu, bahasa daerah pun tidak dihormati dan tidak dikembangkan sepatutnya walaupun hal itu dijamin dalam UUD sebagaimana yang kita lihat di atas. Dengan demikian, bahasa daerah pada umumnya tidak dipakai dalam ruang publik dan tidak diajarkan di sekolah. Bahasa daerah seperti bahasa Sunda hanya dipakai di ruang pribadi dan jarang diandalkan dalam publikasi.

Bahasa Indonesia memperkuat posisinya sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional, bahasa resmi, bahasa media, bahasa administrasi, dan bahasa pendidikan. Dapat dikatakan bahwa kebijakan bahasa di Indonesia seperti ini sangat berhasil untuk mempersatukan bangsa dan memperkuat solidaritas, dan efisiensi pemakaian satu bahasa memajukan perkembangan ekonomi dan pembangunan. Penting juga diperhatikan bahwa pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia berhasil memberantas buta huruf dalam waktu singkat. Kemahiran berbahasa Indonesia menjadi erat kaitannya dengan keberhasilan material bagi semua warga. Berbeda dengan masa kolonial, juga masa globalisasi sekarang ini, yang mementingkan bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Dapat dikatakan bahwa proporsi peran bahasa sedikit "pincang" karena tidak memanfaatkan kegunaan bahasa lain yang ada di lingkungan masyarakat.

Namun demikian, kebijakan bahasa monolingual mengorbankan bahasa lain seperti bahasa asing, bahasa etnis, dan bahasa daerah. Masyarakat multilingual sebelum kemerdekaan mempunyai kekayaan dan keanekaragaman budaya dan nilai-nilai di tengah masyarakat. Hal ini disadari menjelang akhir abad ke-20 karena kemampuan berbahasa Inggris di Indonesia jauh terbelakang di lingkungan masyarakat internasional dan jumlah penutur bahasa-bahasa daerah semakin berkurang. Kita akan melihat arus balik dari kebijakan bahasa di bagian berikut.

3. Masyarakat Multilingual pada Zaman Globalisasi

”Kepincangan” dan kerugian dalam kebahasaan terasa di balik kebijakan bahasa monolingual mulai tahun 1980-an. Usaha untuk menghormati budaya etnis dan bahasa daerah dicoba dalam pendidikan dengan mata pelajaran ”muatan lokal” atau ”mulok” (Moriyama, 2012a). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Bahasa (pada waktu itu masih Pusat Bahasa) mempunyai peranan yang berarti dalam usaha ini. Memang bahasa daerah tidak hilang dan punah sama sekali di bawah kebijakan bahasa tersebut, tetapi keadaan pemakaian bahasa daerah menjadi sangat memprihatinkan. Bahasa daerah seperti bahasa Sunda ada kesan negatif saja di belakang bahasa nasional seperti terbelakang, dusun, tidak resmi, tidak modern, tidak berkembang dan lain-lain (Moriyama, 2012a).

Perubahan keadaan politik, khususnya pergantian pemerintahan pada 1998, merupakan *trigger* atau titik tolak perubahan masyarakat dan juga kebahasaan di Indonesia. Kebetulan perkembangan ICT (*Information and Communication Technology*) pun mulai terasa di Indonesia. Telepon genggam dan jaringan internet memasuki kehidupan orang sehari-hari. Dengan sarana ini masyarakat Indonesia pun dibawa ke dalam arus globalisasi. Kedua unsur yang sangat signifikan ini merasuki benak orang sehingga kelihatannya kesadaran dan perspektifnya mengenai dunia hidup pun berubah. Mereka menyadari masyarakat Indonesia berada di arus informasi yang mengalir secara global lewat internet. Reformasi dalam bidang politik melepaskan masyarakat dari belenggu selama 30 tahun sehingga kebebasan dan demokratisasi di berbagai bidang seperti media massa terasa oleh rakyat.

Perubahan sosial dan politik ini mengubah kebahasaan, antara lain, proporsi pemakaian bahasa Indonesia dan bahasa daerah, bahasa asing khususnya bahasa Inggris dan bahasa Arab. Pertama-tama, bahasa daerah menjadi lebih dihormati sebelumnya dengan peningkatan otonomi daerah (Kagami, 2010: 157—158). Misalnya, Provinsi Jawa Barat menetapkan bahwa bahasa Sunda diwajibkan pada semua jenjang pendidikan pada 2006 dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat dan Peraturan Daerah No. 5 berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 2005 (Moriyama, 2010: 256—260). Selanjutnya, cukup menarik membaca bunyi dokumen mengenai penyusunan kurikulum dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2006 sebagai berikut: ”Murid menghargai dan membanggakan bahasa Sunda sebagai bahasa daerah dan bahasa resmi kedua di Jawa Barat (setelah bahasa

Indonesia)” (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan, 2006: 2—3). Kalimat ini dapat dianggap sebagai suatu ekspresi identitas dan aspirasi orang Sunda yang sudah lama ditekan dalam kedua pemerintahan sebelumnya. Mereka ingin menempatkan bahasa daerah pada tempat yang pantas, tetapi tetap menghormati bahasa nasional. Namun, perubahan seperti ini tidak terjadi pada setiap bahasa daerah. Rupanya, kasus bahasa Sunda ini dapat dikatakan agak istimewa apabila dilihat dari segi aspirasi daerah.

Perubahan yang cukup menonjol juga terjadi pada bahasa Mandarin. Bahasa asing yang selama 3 dekade dilarang dipakai di ruang publik ini secara mendadak muncul di ruang publik karena larangan pemerintah dihapus pada masa Reformasi. Buku-buku berbahasa Mandarin dijual di toko buku, kursus bahasa Mandarin diminati, media massa seperti acara TV dan koran menyiarkan berita dalam bahasa Mandarin kembali. Namun, belunggu yang begitu lama itu sudah merebut kemampuan berbahasa Mandarin dari etnis Tionghoa sehingga tidak semudah dan secepat membangkitkan kembali bahasa asing ini. Betapa pun, sangat penting dicatat bahwa bahasa Mandarin pun boleh dipelajari dan dipakai secara terbuka di lingkungan masyarakat multilingual.

Hal yang sedikit mirip juga terjadi pada bahasa Arab. Sebagaimana kita lihat di atas, Islam juga ditekan waktu pemerintahan Orde Baru karena aspirasi Muslim dilihat salah satu benih bahaya demi stabilitas politik. Begitu demokratisasi masyarakat pada era Reformasi melepaskan belunggu, bahasa Arab menjadi lebih kedengaran di ruang publik baik di perkotaan maupun di pedesaan. Berbeda dengan bahasa Mandarin yang ditekan secara ketat pada masa Orde Baru, bahasa Arab tidak berhenti dipelajari di sekolah dan madrasah di lingkungan agama di seluruh wilayah, khususnya di pedesaan. Oleh karena itu, kemampuan berbahasa Arab itu terpelihara selama pemerintahan Orde Baru. Bahasa Arab mudah bangkit kembali dan memasuki ruang publik. Ekspose Islam tidak terbatas dalam pemakaian bahasa Arab, melainkan juga terlihat menonjol pada busana Muslim dalam kehidupan sehari-hari.

Terakhir, dapat dikatakan bahwa perubahan yang paling menonjol dalam kebahasaan adalah pemakaian bahasa Inggris. Bersama dengan perkembangan ICT yang pesat dibahas di atas, informasi dari luar masuk dengan deras seperti air dari bendungan yang rusak. Kebanyakan informasi diakses dalam bahasa Inggris, dan bahasa Inggris disadari betul sebagai kunci untuk masuk dunia global. Bertambah pula arus manusia yang masuk dan keluar baik bidang bisnis maupun bidang pelancongan (pariwisata). Sekolah-sekolah, dari sekolah dasar sampai dengan SMA, memberikan pelajaran bahasa

Inggris lebih intensif, malah ada sekolah yang mengajar dalam bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.⁸ Pemakaian bahasa Inggris dalam media massa meningkat secara mendadak dan selebar-lebarnya. Pada umumnya kosakata atau ungkapan bahasa Inggris masuk dalam wacana bahasa Indonesia. Percampuran kosakata atau kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia terjadi tidak hanya dengan bahasa Inggris, melainkan juga dengan bahasa Arab.

Kelihatannya, pada zaman globalisasi ini terjadi perubahan kebahasaan yang cukup mencolok. Banyak bahasa terdengar dalam kehidupan sehari-hari, dan orang semakin menjadi multilingual. Sebelum abad ke-21 memang orang hanya mengandalkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, tetapi pada masa globalisasi orang menambah bahasa tanpa ragu-ragu. Muncullah masyarakat multilingual yang berbeda dengan masyarakat kolonial. Pada masa kolonial berbagai masyarakat memakai bahasa masing-masing, tetapi tidak banyak orang yang multilingual, kecuali kalangan atas. Pada abad ke-21 ini muncullah masyarakat multilingual secara keseluruhan negara. Yang perlu dipikirkan adalah proporsi peran di antara bahasa-bahasa yang berlainan dan bagaimanakah orang disarankan berbahasa.

PENUTUP

Bahasa itu sulit diatur. Yang dapat dilakukan adalah menyarankan pemakaian bahasa secara tidak langsung. Pada zaman demokratisasi dan kebebasan masyarakat tidak bisa diarahkan dengan peraturan yang mendikte. Pada zaman globalisasi ini pemakaian bahasa yang pantas harus dipikirkan oleh masyarakat dan juga organisasi yang bertanggung jawab. Perlu diberi tahu bagaimana pentingnya kemampuan berbahasa Indonesia sebagai bahasa pertama. Kemampuan menulis yang baik itu perlu dibina dengan sungguh-sungguh. Hal itu sama juga dengan bahasa Inggris. Hanya berkomunikasi secara lisan saja tidak cukup. Yang perlu dipelajari secara serius adalah tata bahasa bahasa Inggris juga untuk menulis dalam bahasa Inggris yang benar dan baik. Bahasa tulisan yang baik perlu dikuasai dan juga isinya pun sangat penting. Kalau isinya dangkal dan tidak ada keasliannya, orang tidak akan mendengarnya di arena internasional. Hal ini perlu diajarkan di semua jenjang pendidikan.

⁸ Walaupun demikian, mata pelajaran bahasa Indonesia, agama, dan kewarganegaraan dipelajari dalam bahasa Indonesia di sekolah-sekolah yang berbahasa Inggris.

Namun, masyarakat Indonesia yang multilingual perlu didukung dan didorong. Banyak bahasa di masyarakat dan orang yang berbahasa jamak merupakan kekayaan masyarakat Indonesia. Perlu diteguhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga bahasa daerah harus dihargai sebagai kekayaan budaya dan identitas. Orang harus belajar bahasa Indonesia dan bahasa daerah dengan sungguh-sungguh sebagaimana mereka belajar bahasa asing. Tata bahasa dan seni bahasa juga harus diperhatikan supaya mereka bisa berkompetensi bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Rupanya ada kesalahpahaman bahwa bahasa Inggris lebih berprestasi dan bergensi daripada bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Hal seperti ini perlu dibenarkan di sekolah-sekolah secara serius.

Rupanya, definisi orang intelektual antara zaman kolonial dan zaman globalisasi tidak begitu berbeda dari segi kebahasaan. Sebagaimana kita lihat contoh Ahmad Djajadiningrat yang berbahasa Sunda, Jawa, Melayu, (Arab) dan Belanda, orang intelektual sekarang juga ada yang berbahasa daerah, Indonesia, Arab, dan Inggris. Orang yang berbahasa Arab dihargai di masyarakat kalau beliau memberi khotbah selain berceramah ilmiah dalam bahasa Inggris. Sisi rohaniah tidak bisa diabaikan dalam perkembangan manusia selain hal duniawi.

Dapat dikatakan bahwa bahasa-bahasa mewujudkan kekuatan atau mendapatkan dinamika kembali yang sebenarnya pada awal abad ke-21 ini. Keadaan seperti ini perlu disambut dan dipertahankan demi perkembangan masyarakat yang lebih beradab. Tetapi, perlu juga dipikirkan proporsi yang patut antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Lebih banyak bahasa lebih baik bagi orang dan bagi masyarakat. Indonesia diharapkan mempertahankan masyarakat multilingual dengan proporsi yang pantas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelaar, K. Alexander and D.J. Prentice. (1996). "Malay: its history, role and spread", in S.A. Wurum, P. Muhlhausler and D. Tryon (eds.), *Atlas of languages of intercultural communication in the Pacific, Asia and the Americas*. Berlin; New York: Mouton – de Gruyter.
- Agha, A. (2007). *Language and social relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Anderson, Benedict. (2016). *A life beyond boundaries*. London; New York: Verso.
- Coppel, Charles A. (1983). *Indonesian Chinese in Crisis*, Kuala Lumpur: Oxford University Press.

- Djajadiningrat, A. (1936). *Herinneringen van Pangeran Aria Ahmad Djajadiningrat*, Amsterdam/Batavia: G. Koff & Co.
- Errington, Joseph. (2000). Indonesian('s) Authority, in Paul V. Kroskrity ed., *Regimes of Language: Ideologies, Politics, and Identities*, 205—227, Santa Fem New Mexico: School of American Research Press; Oxford: James Currey.
- Foulcher, Keith. (2012) “Fluid Transitions in an Era of Reform” in Keith Foulcher, Mikihiro Moriyama and Manneke Budiman ed., *Words in motion: language and discourse in post-new order Indonesia*, pp. 1—15, Singapore: NUS Press.
- Goebel, Zane. (2010). *Language, Migration, and Identity: Neighborhood Talk in Indonesia*, Cambridge University Press.
- Hwia, Ganjar. (2010). “Perencanaan Bahasa di Indonesia dan Rancangan Undang-undang Kebahasaan: Tuntutan Komunikasi dan Implikasinya”, dalam Mikihiro Moriyama and Manneke Budiman (eds.) *Geliat Bahasa Selaras Zaman: Perubahan Bahasa-Bahasa di Indonesia Pasca-Orde Baru*, pp. 32—59, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Kagami, Haruya. (2010). “Pemakaian Bahasa Nasional/Daerah di Kalangan Remaja: Sebuah Studi Kasus dari Bali” dalam Mikihiro Moriyama and Manneke Budiman (eds.) *Geliat Bahasa Selaras Zaman: Perubahan Bahasa-Bahasa di Indonesia Pasca-Orde Baru*, pp. 152—167, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Maier, H. M. J. (1993) “From Heteroglossia to Polyglossia: The Creation of Malay and Dutch in the Indies”, *Indonesia* 56: 37-65.
- Moriyama, Mikihiro. (2005). *Sundanese Print Culture and Modernity in 19th-century West Java*, Singapore: Singapore University Press.
- , (2008). “Revival of the Sundanese Language?: Some preliminary Views on a Regional Language in Indonesia”, *Academia: Literature and Language* 83: 211—226.
- , (2009). “Lord Hunting Tiger and Malay Learning in Japan Before the War”, in Mary Kilcline Cody and Jan van der Putten (eds.) , *Time, Texts and Technologies: Explorations in the Malay Garden of Knowledge*, pp. 54-65, Singapore: Singapore University Press.
- , (2010). “Bahasa Daerah dan Desentralisasi pada Masa Pasca-Orde Baru”, in Mikihiro Moriyama and Manneke Budiman (eds.) *Geliat Bahasa Selaras Zaman: Perubahan Bahasa-Bahasa di Indonesia Pasca-Orde Baru*, pp. 249-274, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- , (2012a). “Regional Languages and Decentralisation in Post – New Order Indonesia: The Case of Sundanese”, in Keith Foulcher, Mikihiro Moriyama and Manneke Budiman ed., *Words in motion: language and discourse in post-new order Indonesia*, pp. 82-100, Singapore: NUS Press.
- , (2012b). “Indonesia ni okeru Tagengo Jyoukyouto ‘Gengo Seisaku’ (Keadaan Multilingual dan Kebijakan Bahasa di Indonesia)”, in Yukitoshi Sunano ed. *Tagengosyugi Saikou: Tagengo Joukyou no Hikaku Kenkyu (Pikirkan kembali Multilingualism: Studi Banding mengenai Keadaan Multilingual)*, pp. 407-429, Tokyo: Sangen Sha.
- , (2015a). “Indonesiango no Ringahuranka tositeno Yakuwari no Hensen: Ranryou-higashi-indo zidai kara Guroobaruka no zidai made (Perubahan Peranan Bahasa Indonesia sebagai Lingua Franca: Dari Zaman Hidia Belanda sampai Zaman Globalisasi)”, *Kotoba to Syakai (Language and Society)* No, 17: 30—50.
- , (2015b). “Bahasa Sunda dalam Berdoa”, in Julian Millie and Dede Syarif ed., *Islam dan Regionalisme*, pp. 107-116, Bandung: Pustaka Jaya.

- Nagatsumi, Akira. (1980. *Indonesia Minzoku Ishiki no Keisei* (The formation of Indonesian Nationalism). Tokyo: Tokyo University.
- Ophuijsen, Ch. A. van. (1901). *Kitab Logat Melajoe: Woordenlijst voor de spelling der Maleische Taal met Latijnsch Karakter*. Batavia: Landsdrukkerij.
- Putten, Jan van der. (2012). “Going Against the Tide: the Politics of Language Standardisation in Indonesia”, in Keith Foulcher, Mikihiro Moriyama and Manneke Budiman ed., *Words in motion: language and discourse in post-new order Indonesia*, pp. 257—279, Singapore: NUS Press.
- Quinn, George. (2012). “Emerging from Dire Straits: Post – New Order Developments in Javanese Language and Literature”, in Keith Foulcher, Mikihiro Moriyama and Manneke Budiman ed., *Words in motion: language and discourse in post-new order Indonesia*, pp. 65-81, Singapore: NUS Press.
- Shiohaya, Asako. (2010). “Penutur Bahasa Minoritas di Indonesia Timur: Mempertanyakan Keuniversalan Konsep Multibahasa”, dalam Mikihiro Moriyama and Manneke Budiman (eds.) *Geliat Bahasa Selaras Zaman: Perubahan Bahasa-Bahasa di Indonesia Pasca-Orde Baru*, pp. 168-206, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Taylor, Jean Gelman. (2004) *Indonesia: peoples and histories*, New Haven; London: Yale University Press.
- Tsuda, Koji. (2010). “Etnis Tionghoa yang Belajar Bahasa Mandarin: Pencarian ‘Kecinaan’-nya?” dalam Mikihiro Moriyama and Manneke Budiman (eds.) *Geliat Bahasa Selaras Zaman: Perubahan Bahasa-Bahasa di Indonesia Pasca-Orde Baru*, pp. 306—354, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Yuwono, Untung. (2012) “Ilfil Gue Sama Elu! (I’ve Had It With You!): Swear-Words in Contemporary Indonesian Youth Slang”, in Keith Foulcher, Mikihiro Moriyama and Manneke Budiman ed., *Words in motion: language and discourse in post-new order Indonesia*, pp. 16—43, Singapore: NUS Press.



